

**PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM)  
MUHAMMADIYAH LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec.  
Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung)**



**Skripsi**

**Oleh :  
Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih  
1451010180**

**Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM)  
MUHAMMADIYAH LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec.  
Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ekonomi  
Syariah**

**Oleh:**

**ERWIN YULIANTO NURHUDA AL-FAKIH**

**NPM : 1451010180**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Dosen Pembimbing I : Nurlaili, M.A.**

**Dosen Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2021**

## ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menjauhkannya jadi jurang kemiskinan dan meraih kesejahteraan. September 2019, menurut data BPS kemiskinan di Lampung mencapai 1,04 juta orang. Perlu upaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah adalah lembaga yang bergerak untuk memberdayakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan Di Kec. Tegineneng, kab. Pesawaran, prov. Lampung). Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan responden. Teknik analisis data setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan primer, kemudahan dalam akses kesehatan, kemudahan dalam memenuhi biaya pendidikan, dan terlaksananya ibadah zakat maal para petani yang tergabung dalam Komunitas Petani Organik Berkemajuan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesesuaian praktik dan teori yang dibangun dari teologi surat Al-Mauun, memberikan dampak yang baik kepada semangat para petani yang ada dalam

Komunitas Petani Organik Berkemajuan dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Para petani ini bukan sekedar semangat untuk mencari keuntungan materi saja tetapi juga mencari keberkahan, pahala dan ridho dari Allah.

**Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih  
NPM : 1451010180  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Skripsi dengan judul **PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) MUHAMMADIYAH LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)** adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasi ataupun dari saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Maret 2021  
Penyusun,



**Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih**  
**NPM. 1451010180**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jalan Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I- Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)

**Nama Mahasiswa** : Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih

**NPM** : 1451010006

**Jurusan** : Ekonomi Syariah

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Nurlaili, M.A.**

**NIP. 197710152005012003**

**Pembimbing II**

**Diah Mukminatul Hasvimi, S.E.I, M.E.Sy**

**NIP.**

**Ketua Jurusan,**

**Madnasir, S.E., M.S**

**NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1- Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)”** disusun oleh **Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih, NPM: 1451010180**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 05 Mei 2021**

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E., M.Si**

Sekretaris : **Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

Penguji I : **Ahmad Zuliansyah, S.S., M.M**

Penguji II : **Nurlaili, M.A**

Penguji III : **Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I, M.E.Sy**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Dr. Ruslan Abdul Ghafur, S.Ag., M.Si**

NIP. 198 008012003121001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

*"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS. Muhammad: 7)*

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْنَعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا  
مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu (belajar agama) yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).*

- "Tidak ada kata istirahat bagi seorang mukmin sebelum dia bertemu dengan Rabbnya."
- "Apapun masalahnya, Islam adalah solusinya."

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Ichwanuddin dan Ibu Herminingsih, dan kedua mertuaku, Bapak Muhtarom dan Ibu Sumarti yang selalu memberikan doa dan harapan serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga putramu ini menjadi anak yang sholeh dan ilmu yang diperoleh selama ini dapat bermanfaat bagi orang lain serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
2. Guru-guruku yang terhormat, Ustadz Busthomi Al-Jawy, Ustadz Lukman Salamuddin, Ustadz Agus Tri Waluyo, dan lainnya yang telah memberikan banyak sekali inspirasi.
3. Istriku tercinta, Intan Pertiwi dan anakku tersayang, Sarah Faqihatun Nisa yang telah memberikan motivasi dan warna-warni kehidupan. Yang selalu memberi dukungan dan doa.
4. Sahabat dan keluargaku yang ada di komunitas Yuk Ngaji Lampung, di Yayasan Pencetak Generasi Unggul dan Mulia (PGUM), di kelas F angkatan 2014, di KKN dan di berbagai komunitas lain seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bapinda, Muslim Kaffah Community dan yang lainnya yang telah memberikan masukan dan pengalaman hidup yang berharga.
5. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah dan Almamater UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih di lahirkan di desa Karang Rejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 1995 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Ichwanuddin dan Ibu Herminingsih.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan sekolah dasar di tempuh di SD Negeri 04 Karang Rejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang diselesaikan pada tahun 2008.
2. Melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMPN 1 Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang di selesaikan pada tahun 2011.
3. Melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan di SMK Taruna Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
4. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT serta berkat pertolongan dari Ustadz Lukman Salamuddin, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Lampung Indonesia yaitu UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Islam pada tahun 2014.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, sahabat, serta pengikut beliau.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) dalam bidang ilmu syariah. Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang terkait dalam keperluan Akademik maupun Jurusan.
3. Ibu Nurlaili, M.A. selaku pembimbing satu yang telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai
4. Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I, M.E.Sy, selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran, kesabaran, perhatian dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku Ekonomi Syariah 2014, khususnya kelas F yang bersedia berbagi saran dan semangatnya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu namun penulis mengucapkan banyak terimakasih.

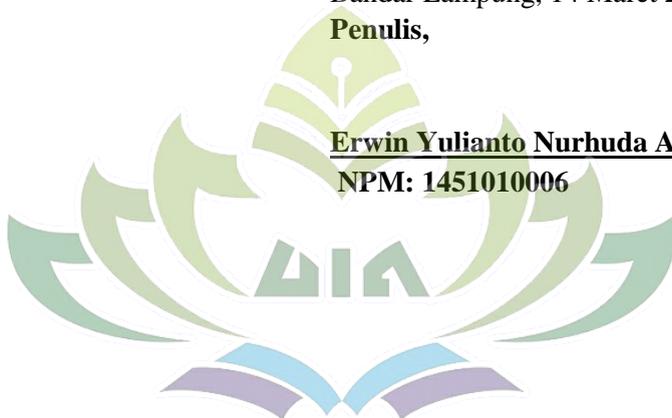
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya dan Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Maret 2021

**Penulis,**

**Erwin Yulianto Nurhuda Al-Fakih**

**NPM: 1451010006**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Populasi dan Sampel.....	12
H. Metode Pengolahan Data .....	13
I. Penelitian Terdahulu .....	15
J. Kerangka Berpikir .....	22
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	21
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	23
B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam.....	24

1. Kewajiban Negara Kepada Rakyat.....	25
2. Kewajiban Pemenuhan Nafkah .....	27
3. Konsep Pengentasan Kemiskinan .....	28
C. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam.....	29
1. Asas Kepemilikan ( <i>Al-Milkiyah</i> ) .....	30
2. Asas Pengelolaan Kepemilikan ( <i>Tasharruf Al-Milkiyah</i> ).....	33
3. Distribusi Kekayaan Di Antara Manusia .....	34
4. Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Konvensional .....	34
5. Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam.....	37
D. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah	40
1. Visi dan Misi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah .....	41
2. Medan Jihad Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah .....	42
E. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung.....	43
1. Program Strategis MPM Muhammadiyah Lampung.....	44
2. Program dan Kegiatan MPM Muhammadiyah Lampung.....	49
3. Realisasi Program MPM Muhammadiyah Lampung.....	51
F. Teologi Al-Ma'un Muhammadiyah.....	52

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1. Profil Singkat Kabupaten Pesawaran .....	57
2. Profil Singkat Kecamatan Tegineneng.....	59
B. Profil Komunitas Petani Organik Berkemajuan.....	63
1. Sejarah Singkat .....	63
2. Identitas.....	64
3. Visi dan Misi.....	65
4. Ruang Lingkup .....	65

5. Susunan Pengurus .....	65
6. Daftar Anggota .....	66
7. Produk Komunitas .....	67
C. Realisasi Program Pemberdayaan Komunitas Petani Padi Organik Berkemajuan .....	68

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan Di Kecamatan Tegineneng ....	71
B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan Di Kecamatan Tegineneng .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
Tabel 2.1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegineneng.....	63
Tabel 2.2 Data penduduk Tegineneng berdasarkan jenis kelamin. ....	64
Tabel 2.3 Data Kepadatan Penduduk Tegineneng .....	65
Tabel 3.1 Identitas .....	67
Tabel 3.2 Susunan Pengurus .....	68
Tabel 3.3 Daftar Anggota.....	68



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Skema 1.1 Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 1.1 Produk Komunitas Petani Organik Berkemajuan .	70



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Rangkuman Wawancara
- Lampiran 3 Panduan Wawancara
- Lampiran 4 Rangkuman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Pra riset
- Lampiran 6 Surat balasan Penelitian
- Lampiran 7 Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8 Foto Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu kiranya judul skripsi ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Judul skripsi ini “**PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) MUHAMMADIYAH LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)**” maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Peran** menurut Susanto A.S. mengenai definisi peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>1</sup>
2. **Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah** adalah badan pembantu pimpinan Muhammadiyah dengan *focal point* pada pemberdayaan masyarakat. MPM adalah “produk baru” sebagai hasil keputusan Mukhtamar ke-45 di Malang tahun 2005.<sup>2</sup>
3. **Pemberdayaan** berasal dari kata daya yang berarti mempunyai daya atau kekuatan mempunyai tenaga kerja, ikhtiar.<sup>3</sup> Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk

---

<sup>1</sup>Nessy Lusida, *Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, 2017) hlm. 3

<sup>2</sup>Majelis Muhammadiyah, (Online) <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-46-cam-majelis.html> (diakses pada 3 Agustus 2020 pukul 17.36 WIB)

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 325

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.<sup>4</sup> Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau individu yang lemah, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari adanya perubahan sosial dimana masyarakat memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. **Kesejahteraan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa dan makmur; selamat (selamat dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman.<sup>5</sup> Dalam konteks ekonomi bisa difahami berada dalam kondisi aman secara ekonomi terbebas dari gangguan kemiskinan, kelaparan, kesusahan dan lainnya.
5. **Masyarakat** adalah sekumpulan orang yang hidup pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penulis dalam judul ini adalah bagaimana partisipasi badan pembantu organisasi Muhammadiyah yaitu Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memuhi kebutuhannya dan meningkatkan mutu atau kualitas masyarakat.

---

<sup>4</sup> Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alabeta, 2014) h. 117

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 1283

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 924

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Objektif

Kualitas masyarakat pada dasarnya dapat diukur dari tingkat pendidikan, pendapatan dan kesehatannya. Dari ketiga hal itu, tingkat pendapatan menentukan kualitas kesehatan dan pendidikan. Saat pendapatan tinggi otomatis kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat pun lebih baik. Sayangnya sebagian masyarakat Indonesia masih berada dalam kualitas yang kurang baik. Hal ini bisa kita lihat dari pendapatan sebagian masyarakat yang cukup rendah sehingga mereka masuk dalam golongan masyarakat miskin.

Badan Pusat Statistik mencatat pada September 2020 penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,55 juta orang.<sup>7</sup> Dari sini penulis memilih meneliti tentang peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung. Dengan tujuan bisa mencari solusi untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Karena judul tersebut sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang peran pemberdayaan MPM Muhammadiyah di Lampung, sehingga akan menambah literatur dan wawasan tentang perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Karena penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini didukung tersedianya literatur-literatur yang berkaitan dengan Muhammadiyah di Lampung yang dibutuhkan oleh penulis sebagai referensi.

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*, bps.go.id (diakses pada 5 Mei 2021 pukul 08.58 WIB)

### C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa. Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke terdapat banyak sekali macam suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Dalam kegiatan ekonomi, pada umumnya semua sama. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dengan cara bekerja, berkarya berdagang, bertani dan lain sebagainya. Mengerahkan semua potensi diri untuk mendapatkan penghasilan agar mampu melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.

Dalam kehidupan saat ini, percepatan teknologi begitu pesat. Sehingga persaingan dalam hal inovasi ekonomi berlangsung terus-menerus di masyarakat. Sehingga mereka yang tidak mampu mengikuti arus teknologi akan tertinggal. Akibatnya mereka yang tertinggal akan kesulitan untuk berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Padahal potensi yang dimiliki masyarakat pada dasarnya tidak jauh berbeda. Maka penting adanya pemberdayaan kepada masyarakat secara umum.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada sumber daya manusia dipedesaan khususnya, agar tercapainya penciptaan peluang usaha sesuai dengan masyarakat. Pemberdayaan dalam menentaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan adanya perubahan pola pikir individu atas masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan seseorang, khususnya yang rentan atau lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada di lingkungan,. Masyarakat didorong untuk melakukan

perubahan dimulai dari dirinya sendiri atau dilakukan dari hal kecil, perubahan dapat berpengaruh pada lingkungannya.<sup>8</sup>

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi besar di Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah islamiyah. Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KH Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, terutama sekali surat Ali Imran, ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Berdasarkan ayat inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam penafsiran ayat yang lain, dalam surat Al-Maun, memberikan semangat juang tersendiri bagi perjuangan Muhammadiyah memberdayakan ekonomi masyarakat. Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

<sup>8</sup> Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alabeta, 2014) h.58

<sup>9</sup> (On-Line) Ciri Perjuangan Muhammadiyah, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-176-det-ciri-perjuangan.html> (diakses 12/03/2019 pukul 14.35 WIB)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا  
يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)  
وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣)

Artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”. (QS. Al-Maun: 1-3)

Gerakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan berbasis pada rumusan teologi Al-Maun selama ini menjadi salah satu *spirit* bagi Muhammadiyah di dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dan keberpihakan terhadap kaum yang lemah. Dalam rumusan tersebut, terkandung rumusan penting untuk berpihak kepada kaum miskin.<sup>10</sup> Dari sinilah Muhammadiyah memulai gerakannya. Keikhlasan dan kepedulian kepada masyarakat menjadi kunci perjuangan Muhammadiyah.

Kontribusinya terhadap masyarakat dan negara sudah sangat terlihat jelas di mata kita semua. Dalam bidang pendidikan misalnya, Muhammadiyah begitu konsentrasi untuk meninggikan martabat masyarakat melalui pendidikan. Dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) hingga Universitas Muhammadiyah sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam bidang ekonomi dan masyarakat umum, Muhammadiyah juga berkontribusi aktif menaikkan nilai tawar masyarakat melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah membuat

<sup>10</sup> Hemptri Suyatna, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Politik Inklusi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: UMY Press, 2019) hlm. 86

badan khusus untuk pemberdayaan masyarakat yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). MPM memiliki visi peningkatan kapasitas daya saing, dan posisi tawar, dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan Oemem (PKO) dan gerakan Al-Maa'uun, menuju kehidupan sosial yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah telah mewujudkan berbagai program nyata di tengah-tengah masyarakat, seperti program budidaya padi organik, ternak kambing pembibitan dan penggemukan, padi semi organik, pelatihan pengelolaan bank sampah, pengolahan rumput laut, peningkatan Unik Kegiatan Masyarakat (UMK) dan yang lainnya di berbagai tempat di Indonesia.<sup>12</sup>

Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah juga memiliki cabang di provinsi Lampung. Lampung merupakan provinsi yang memiliki jumlah rakyat miskin begitu banyak, informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada September 2020 penduduk miskin di Lampung mencapai 1,09 juta orang.<sup>13</sup> Ini merupakan angka yang sangat besar tentunya. Walau pun hal ini merupakan kewajiban pemerintah secara khusus, namun secara umum ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah termasuk di Lampung. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang peduli bangsa dan negara tentunya ingin selalu membantu masyarakat untuk meningkatkan nilai tawar masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk penelitian secara mendalam dengan judul "PERAN MAJELIS

---

<sup>11</sup> (On-Line) Visi Majelis Pemberdayaan Masyarakat, <http://mpm.muhammadiyah.or.id/> (diakses 9/12/2019 pukul 22.19)

<sup>12</sup> Ririn Nopiah, et. al, *Kabar MPM*, (Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah PP Muhammadiyah, 2016), hlm. 17

<sup>13</sup> (On-Line) Profil Kemiskinan Provinsi Lampung, <https://lampung.bps.go.id> (diakses 5/5/2021 pukul 09.00)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) MUHAMMADIYAH LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.)”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya mengenai peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2018) hlm. 1

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 2

<sup>16</sup> Noor Juiansyah, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta Kencana , 2013), hlm.34.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>17</sup> Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di di Organisasi Muhammadiyah Lampung dan Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.”. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang asli.<sup>18</sup> Adapun data primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara interview dan observasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain.<sup>19</sup> Untuk sumber data sekunder, penulis

---

<sup>17</sup> Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 32

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*, PT. Bumi Aksara, Bandung, 2006, hlm.19

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar metodetknik*, Tarsindo, Ed.7. Bandung, 2000, hlm.134

mengumpulkan data dari buku-buku ekonomi, dan literature-literature lain yang berkaitan seperti : artikel-artikel, majalah, jurnal penelitian, surat kabar, mencari info dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data ini, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>21</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.<sup>22</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Pendidikan Fakultas Sikologi UGM, Yogyakarta, 2012, hlm.72

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.137

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.138

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm.65

### c. Metode Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>24</sup> Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi partisipasi moderat, dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti mengumpulkan data ikut observasi dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semua. Peneliti menggunakan data-data yang sudah ada di Organisasi Muhammadiyah Lampung dan langsung ikut dalam beberapa kegiatan Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

## G. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digenerasikan.<sup>25</sup> Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung, yaitu sebanyak 23 responden.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>27</sup> Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi agar lebih mudah melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan

---

<sup>24</sup> I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, edisi 1), hlm.52

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.206

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 109

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>28</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *sampling non random* atau *sample nonprobabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau element populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>29</sup> Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah semua masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung yaitu sebanyak 23 responden.

## H. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

### 1. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti didalam megelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### a. Data *Collection* (Mengkoleksi Data)

Hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna, catatan lapangan yang berupa huruf desa, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semerawut, yang tidak dapat dipahami.

#### b. Data Reduction (Merangkum Data)

Reduksi data adalah proses transformasi. Mereduksi data berarti “merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.” Dalam kaitan ini penulis menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, bandung, 2009, hlm. 116

<sup>29</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.91

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga menyimpulkan data.

c. *Data Display* (Menyajikan Data)

Dalam kaitan ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

d. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, ketertarikan, pola-pola, alur sebab atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut menjadi umum

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum dan merangkai kata-kata yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah

Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Petani Organik Berkemajuan di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.

## I. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang peneliti gunakan yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

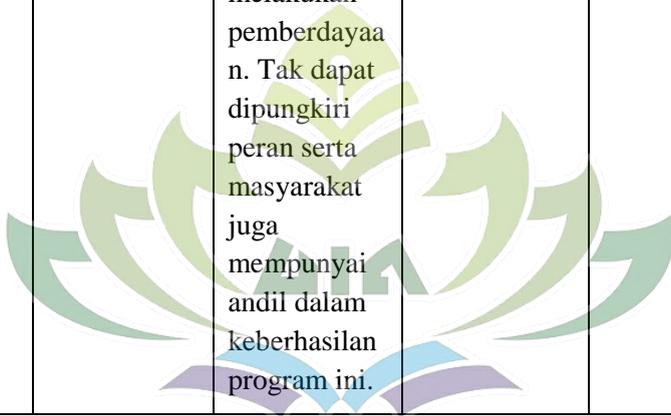
**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nessy Lusida (2017)	Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong,	MPM mampu menyumbangkan gagasannya untuk kepentingan masyarakat desa Warmon Kokoda. MPM juga memiliki peran untuk mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap variable yang sama yaitu peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah.	Penelitian sebelumnya membahas tentang pembentukan dan penguatan pemerintah desa; dan mengambil studi kasus di desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua

	Papua Barat)	Desa Warmon Kokoda. Pembentukan desa menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan dapat memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan musyawarah ditingkat desa. Musyawarah perencanaan dan pembangunan dapat mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Suku Kokoda.		Barat.
Muhammad	Peran Pemuda	MPM melakukan	Penelitian sebelumnya	Penelitian sebelumnya

Rifa'at Adiakarti Farid (2019)	Majelis Peremberday aan Masyarakat dalam Pendamping an Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu	pemberdayaa n di TPST Piyungan dengan garda terdepannya melalui pemuda yang tergabung dalam fasilitator pemberdayaa n. Dalam pelaksanaann ya, MPM secara perlahan berhasil merubah pola pikir masyarakat di sekitar TPST, antara lain dengan membiasaka n diri cuci tangan, terbiasa menggunaka n computer secara dasar dan perilaku hidup sehat. MPM melalui fasilitator juga	melakukan penelitian terhadap variable yang sama yaitu peran Majelis Pemberdaya an Masyarakat (MPM) Muhammadi yah	a membahas tentang pendampin gan komunitas pemulung di tempat pembuanga n sampah terpadu; dan mengambil objek penelitian di daerah Yogyakarta.
---	---	---	---	--

		<p>memfasilitasi pembentukan komunitas pemulung, komunitas yang dimaksud untuk mewadahi pemulung agar MPM mudah dalam melakukan pemberdayaan. Tak dapat dipungkiri peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam keberhasilan program ini.</p>		
--	--	--	--	--

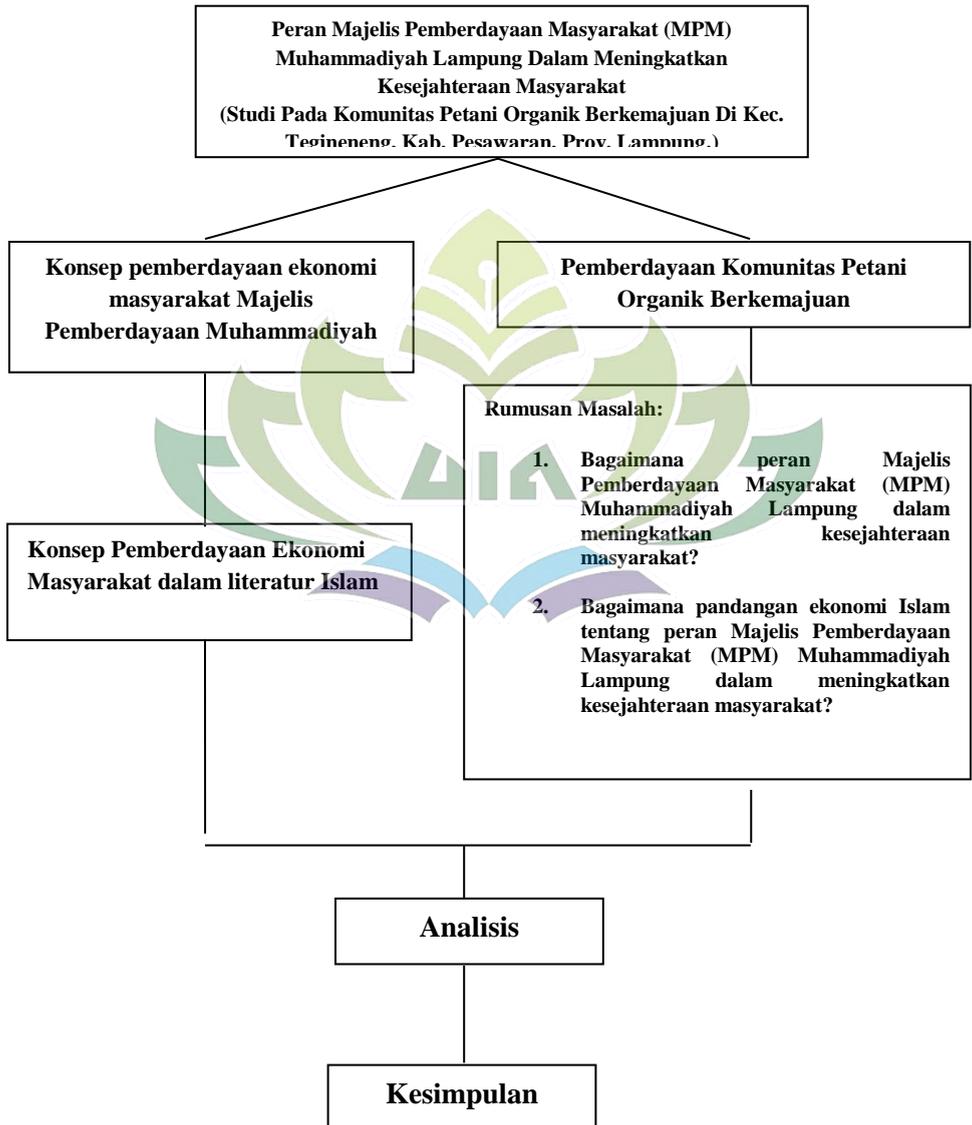


## J. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

### Skema 1.1

#### Kerangka Pikir



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mempunyai daya atau kekuatan mempunyai tenaga kerja, ikhtiar.<sup>30</sup> Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.<sup>31</sup>

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau individu yang lemah, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari adanya perubahan sosial dimana masyarakat memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara swadaya mengolah sumber daya apa saja yang dapat dikuasai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarga.<sup>32</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik

---

<sup>30</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 325

<sup>31</sup> Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alabeta, 2014) h. 117

<sup>32</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996). hlm. 1

dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.<sup>33</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kehidupan masyarakat yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus mengutamakan keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.<sup>34</sup>

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:<sup>35</sup>

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan

---

<sup>33</sup> Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, (Padang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, 2012) h, 78

<sup>34</sup> Murdani, Sus Widayani, Hadromi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019) h, 154.

<sup>35</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalm Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015) h, 28

- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tidak diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- d. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan
- e. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan. Baik yang berupa hubungan manusia dengan Allah (*hablu minallah*) seperti ibadah dan aqidah, hubungan manusia dengan dirinya (*hablu min an-nafsi*) seperti makan, minum, pakaian dan akhlak, hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablu min an-naas*) seperti *muamalah* dan *uqubat*.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

*“Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah Kucukupkan Nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Ku-ridhai Islam sebagai agama kalian.” (QS. al-Maidah: 3)*

Dalam Islam, ekonomi masuk dalam pembahasan muamalah. Ekonomi Islam memiliki ciri khas yang berbeda jauh dengan konsep ekonomi kapitalisme atau pun sosialisme. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam Ekonomi Islam, halal haram adalah yang paling utama. Bukan sekedar mencari manfaat atau pun keuntungan belaka, tetapi juga berkah dan ridho dari Allah Sang Maha Esa.

Masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah masalah serius dalam pandangan Islam. Bahaya kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi dapat merusak akidah, merusak akhlak, merusak stabilitas keamanan dan menciptakan

kecemburuan sosial di masyarakat.<sup>36</sup> Islam memiliki konsep yang universal dalam memberdayakan perekonomian rakyat.

### 1. Kewajiban Negara kepada rakyat

Dalam Islam, fungsi Negara adalah melaksanakan syariat. Baik dalam masalah hukum, pendidikan, politik sampai masalah ekonomi, negara wajib menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Syariat Islam juga memberi kewajiban yang khusus kepada Negara dalam masalah ekonomi masyarakat seperti mengatur Baitul Mal, mendistribusikan *ghanimah* sampai menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Dalam Islam, kebutuhan primer masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab Negara. Adapun tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan primer, menurut pandangan hukum Islam, terbagi dua;<sup>37</sup>

- a. Kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu rakyat.

Kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu adalah pangan, sandang, dan papan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiganya merupakan kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu; manusia tidak akan dapat merasakan cukup (puas) hanya dengan salah satu diantara ketiganya itu. Oleh karena itu, pemenuhan ketiga kebutuhan primer itu merupakan hak bagi setiap manusia yang wajib dia peroleh.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Mohammad Amin Kudhori, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Universitas Walisongo, 2013) h, 7

<sup>37</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009) h, 168

<sup>38</sup> Ibid., 168-169

- b. Kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.

Yang termasuk kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan (kesehatan), dan pendidikan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.” (HR. Muslim).

Ketiga perkara ini –keamanan, pendidikan dan pengobatan—merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia. Pengadaannya untuk semua manusia menjadi tanggung jawab Negara. Tanggung jawab Negara

terhadap ketiga perkara ini sama, baik terhadap orang fakir miskin atau orang kaya, karena ketiganya merupakan kebutuhan primer bagi manusia.<sup>39</sup>

## 2. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan (Nafkah)

### a. Seorang suami wajib menafkahi istrinya

Dalam Islam, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Sekalipun si istri orang yang kaya.<sup>40</sup> Islam mewajibkan pemberian nafkah secara mutlak, jika wanita itu miskin, baik dia mampu bekerja atau tidak. Islam tidak mewajibkan wanita bekerja, tetapi mewajibkan pemberian nafkah kepada wanita.<sup>41</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat mana saja kalian tinggal menurut kadar kemampuan kalian. (QS. Ath-Thalaq: 6)

### b. Ayah berkewajiban menafkahi anak-anaknya

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kewajiban ayah memberi makan dan pakian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (QS. Al-Baqarah:233)

### c. Anak laki-laki berkewajiban menafkahi orang tuanya.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Berbuat baiklah kepada ibu bapak.” (QS: Al-Isra: 23)

<sup>39</sup> Ibid., 195-196

<sup>40</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (UNSYIAH Kuala: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015) h, 382

<sup>41</sup> Op.Cit., 172

d. Kewajiban menafkahi kerabat dekat

Islam mewajibkan keluarga memberi nafkah kepada keluarga dekatnya yang menjadi tanggungannya.<sup>42</sup> Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Ahli waris pun berkewajiban demikian.”

(QS: Al-Baqarah: 233)

e. Kewajiban negara menafkahi orang-orang lemah tanpa keluarga

Orang-orang yang tidak mampu dan memiliki keluarga yang menafkahnya seperti anak yatim, fakir, miskin, peminta-minta dan sejenisnya maka tanggungjawab Negara untuk memenuhi kebutuhannya. Intinya, jika tidak ada seorang pun yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya atau ada tetapi dia tidak dapat memberinya, maka syariah membebaskan kewajiban nafkah dalam dua keadaan ini kepada Baitul Mal, yakni kepada Negara.<sup>43</sup>

### 3. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Menurut Islam kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan dan diberdayakan. Bahkan penyakit yang harus diobati, Islam menolak ketidakadilan, Islam menuntuk keadilan. Cara al-Qur'an memperdayakan kaum ekonomi lemah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan semangat kerja
- b. Kewajiban membayar zakat
- c. Pengharaman riba
- d. Pengharaman monopoli

---

<sup>42</sup> Ibid., 176

<sup>43</sup> Ibid., 182

- e. Pengharaman menimbun harta
- f. Membudayakan infak
- g. Membagikan ghanimah<sup>44</sup>

### C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM ISLAM

Semua sistem ekonomi pasti bertujuan untuk meraih kesejahteraan. Tidak ada sistem ekonomi di dunia ini yang tujuannya untuk menyengsarakan rakyatnya. Hanya saja perbedaan pandangan mendasar pada setiap sistem membuat cara penerapan aturan ekonomi di masyarakat pun berbeda antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lain.

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kewajiban yang harus diwujudkan oleh kepala Negara, masyarakat dan kepala keluarga. Menelantarkan rakyat atau keluarga adalah perbuatan zalim yang harus dihindari. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kesejahteraan akan di dapat hanya dan hanya jika penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al-A'raf: 96)

Tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari syariah. Yang menurut Asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia seluruh dunia,

---

<sup>44</sup> Mohammad Amin Kudhori, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Universitas Walisongo, 2013) h, 25

yang terletak pada terlindungnya keimanan (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).<sup>45</sup>

Islam memiliki konsep dasar atau asas dalam pandangan ekonominya. Islam memandang bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Manusia hanyalah sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengatur harta benda yang ada di langit dan bumi sesuai dengan izin dari Allah melalui syariat yang dicontohkan oleh Rasul-Nya yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Mutholib *shallallahu 'alaihi wasallama*.

## 1. Asas Kepemilikan (*Al-Milkiyah*)

Salah satu asas (dasar/pondasi) dalam filsafat ekonomi Islam adalah pandangannya tentang kepemilikan harta. Islam membagi kepemilikan (*al-milkiyah*) menjadi 3, yaitu;

### a. Kepemilikan Umum

Meliputi mineral-mineral dalam bentuk padat, cair dan gas termasuk petroleum, besi, tembaga, emas dan sebagainya yang didapati sama ada di dalam perut bumi atau di atasnya, termasuk juga tenaga dan intensif tenaga serta industri-industri berat. Semua ini merupakan hak milik umum dan wajib diuruskan (dikelola) oleh Daulah Islamiyah (Negara) manakala manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat.<sup>46</sup>

Al-Hâfîzh Ibnu Hajar al-‘Asqalânî di dalam Kitab *Bulûghul Marâm* membawakan hadis sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلَالِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>45</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 62

<sup>46</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012) h, 42

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu ‘anhu*, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu ‘alaihiwasallam*, lalu aku mendengar beliau bersabda: “Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud. Tokoh-tokohnya terpercaya)<sup>47</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
 « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ  
 وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ (رَوَاهُ  
 ابْنُ مَاجَه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; “Orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, padang rumput, api, dan harganya haram.” (HR Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan api adalah bahan bakar dan apa saja yang terkait dengannya.<sup>48</sup> Batu bara, listrik, gas bumi, minyak bumi masuk dalam pembahasan sumber daya api. Sehingga ini semua adalah harta milik umum. Termasuk juga sumber daya air seperti sungai, danau, laut dan lainnya. Juga padang rumput maksudnya seperti hutan, gunung, bukit dan lainnya. Negara lah satu-satunya yang mengelola itu semua untuk kepentingan masyarakat umum.

Sehingga dalam proyek perhitungan pertumbuhan ekonomi, industri swasta yang bergerak dalam bidang kepemilikan umum contohnya seperti industri pertambangan emas, batu bara, minyak bumi dan lainnya. dalam Islam adalah industri yang zalim dan harus dihentikan. Karena “memakan” harta milik banyak orang. Dan harus dikelola oleh Negara.

---

<sup>48</sup> Ibid., 97

b. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/Negara, dimana khalifah/Negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai ijihad/kebijakannya.<sup>49</sup> Contohnya seperti harta *jizyah*, *ghamimah*, *fa'i*, *dharibah*, *usyur*, *kharaj*, harta yang tidak ada ahli warisnya dan lainnya.

Dalam Islam, salah satu sumber pendapatan Negara adalah berasal dari harta milik Negara. Dan ini masuk dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam Islam sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.

c. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaan (*utility*)nya oleh orang lain seperti di sewa, atau pun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>50</sup>

Contohnya seperti roti, rumah, motor, mobil yang sifatnya boleh dimiliki pribadi. Masing-masing individu boleh melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai kemampuan modal dan usahanya dalam

---

<sup>49</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, (Riau: UIN SUSKA RIAU, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012) h, 156

<sup>50</sup> Sulistiawati, Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, (Indragiri: Jurnal Syariah Vol. V, No. 2, Oktober 2017) h, 35

mengembangkan ekonomi pribadinya. Batasannya adalah hanya pada harta milik individu. Individu dilarang menguasai harta milik umum atau pun milik negara untuk menghindari mudhorot dan kezaliman atas sesama manusia. Sehingga dalam proses perhitungan perkembangan ekonomi masyarakat Islam yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Asas Pengelolaan Kepemilikan (*Tasharruf Al-Milkiyah*)

Dalam Islam, manusia wajib mengelola hartanya sesuai dengan syariah Islam agar tetap tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Pengelolaan kepemilikan ini dibagi dua, yaitu:

### a. Pengembangan Harta (*Tanmiyatul Mal*)<sup>51</sup>

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak harta yang telah dimiliki dengan ketentuan Islam. Contohnya seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan lain sebagainya. Manusia dilarang mengembangkan hartanya dengan cara yang haram seperti judi, riba, *ihthikar* (menimbun barang), dan lainnya.

### b. Pembelanjaan Harta (*Infaqul Mal*)

Pembelanjaan harta adalah kegiatan mengeluarkan harta tanpa kompensasi, seperti membeli makanan, baju, menyewa rumah, dan lainnya. Manusia dilarang membelanjakan harta dengan cara yang haram seperti membeli minuman keras, daging babi, menyewa pelacur, dan lain sebagainya.

---

<sup>51</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2005,

### 3. Distribusi Kekayaan Di Antara Manusia (*Tauzi'ul Amwal Baina An-Naas*)<sup>52</sup>

Masalah kesejahteraan dalam Islam pada dasarnya adalah karena distribusi yang tidak merata di antara manusia. Sehingga kesejahteraan di masyarakat tidak merata. Maka Islam juga mengatur agar distribusi harta tetap merata kepada masyarakat. Secara umum mekanisme yang ditempuh untuk menjaga perputaran harta di antara manusia dibagi dua, yaitu:

#### a. Mekanisme Ekonomi

Yaitu kegiatan mendistribusikan harta yang bersifat produktif dan mencari profit. Seperti menciptakan lapangan kerja, membangkitkan kegiatan ekonomi yang halal seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah dan lainnya. Juga melarang kegiatan ekonomi yang haram dan merusak seperti penimpunan harta, praktek monopoli, korupsi, suap dan lainnya.

#### b. Mekanisme Non-Ekonomi

Yaitu kegiatan mendistribusikan harta yang bersifat non-produktif atau non-profit seperti kegiatan sedekah, zakat, hibah, wakaf, dan lainnya kepada masyarakat sesuai aturan syariat Islam.

### 4. Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Konvensional

Berdasarkan indikator menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan menggunakan 8 pendekatan yaitu:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga
3. Keadaan Tempat Tinggal

---

<sup>52</sup> Hafidz Abdurrahman, et.al, *Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Alfatih Press, 2017, hlm. 69

4. Fasilitas Tempat Tinggal
5. Kesehatan Anggota Keluarga
6. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
7. Kemudahan Pendidikan
8. Kemudahan Transportasi.<sup>53</sup>

Sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) indikator kesejahteraan lebih diperinci dalam lingkup keluarga, yaitu:

- a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*):
  1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
  2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
  4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
  6. Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga, yaitu:

---

<sup>53</sup> Eko Suguharto, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, Samarinda: Jurnal FPIK UNMUL Samarinda, 2007, EPP.Vol.4.NO.2.2007:32-36 hlm. 33

1. Pada umumnya anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  2. Paling kurang sekali seminggu, seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
  3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
  5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
  6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
  8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), yaitu:
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
  2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
  4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
  5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV/internet.

d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*), yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.<sup>54</sup>

## 5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam

Sementara dalam Islam, Islam memiliki pandangan yang khas, termasuk dalam masalah kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi materiil saja. Walau pun juga memiliki perhatian pada sisi materiil. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam secara umum Surat Quraisy ayat 3-4;

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ <sup>(٣)</sup>  
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ هَٰؤُلَاءِ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ <sup>(٤)</sup>

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”(QS. Al-Quraisy: 3-4)

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu;

a. Menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah,

Maknanya adalah peningkatan ibadah seperti dapat melaksanakan zakat, infak, sedekah, umrah, haji dan sejenisnya.

---

<sup>54</sup> Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut BKKBN, (On-Line), aplikasi.bkkbn.go.id, diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

b. Menghilangkan lapar

Maknanya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok individu secara layak yaitu sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan pokok secara umum seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

c. Menghilangkan rasa takut.<sup>55</sup>

Maknanya adalah terpenuhinya kepuasan batin yang membuat manusia merasa tenang, senang, aman, bahagia dan tidak khawatir.

Pada dasarnya konsep kesejahteraan masyarakat dalam Islam ini adalah untuk menegakkan *maslahat maqashid syariah*. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, *maslahat* terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.<sup>56</sup>

a. *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Menurut Imam Al-Ghazali ada lima hal yang menjadi *maslahat dharuriyyat* adalah:

- 1) Menjaga agama (*hifzud-din*)
- 2) Menjaga jiwa (*hifzun-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*hifzul aql*)
- 4) Menjaga nasab (*hifzun-nasl*)
- 5) Menjaga harta. (*hifzul maal*)<sup>57</sup>

Dalam konteks ekonomi, contoh *masalah* ini adalah kebutuhan primer seperti makanan pokok, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

<sup>55</sup> Ibid., 390

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, hlm. 53

<sup>57</sup> Ibid., hlm 39.

b. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagaimana besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini. Contoh dalam konteks fikih untuk *masalah hajiyyah* ini adalah *rukhsah* (keringanan) dalam sholat bagi orang yang tengah sakit atau bepergian.<sup>58</sup>

Sementara dalam konteks ekonomi bisa difahami sebagaimana kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Seperti mobil, laptop, baju tambahan, dan lainnya.

c. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram.<sup>59</sup> Contoh untuk *masalah* ini dalam konteks fikih adalah seperti menutup aurat bagi laki-laki dilebihkan dari batas yang diwajibkan baik di dalam shalat mau pun di luar shalat. Menghilangkan kotoran yang menempel (yang tidak termasuk kategori najis karena najis memang wajib dibersihkan) menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ketika akan menunaikan shalat dan lain-lain.<sup>60</sup>

Dalam konteks ekonomi, bisa kita samakan seperti kebutuhan tersier (tambahan) seperti pernak-pernik mewah, mobil mewah, rumah bertingkat dan lainnya.

---

<sup>58</sup> Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamshah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslaha*, Kerinci: STAIN Kerinci, Al-Qishthu Voume 13, Nomor 1 2015, hlm. 23

<sup>59</sup> Op.Cit., hlm. 54

<sup>60</sup> Op.Cit., hlm. 25

## D. MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi dakwah di Indonesia yang sudah dikenal masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Gerakan dakwah ini sudah menyebar di seluruh nusantara dari Sumatra hingga Papua. Muhammadiyah secara etimologi berarti pengikut nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasalam*, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan 'ya' nisbiiyah. Sedangkan secara terminology berarti gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>61</sup>

Muhammadiyah berdiri dari semangat Qur'an surat Ali Imran ayat 104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.<sup>62</sup> Hingga saat ini, Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi tertua di Indonesia yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun.

Dalam pergerakannya, Muhammadiyah memiliki berbagai Majelis sesuai bidang yang menjadi fokus gerak

<sup>61</sup> M. Khairul Anwar, Jovi Septian Ramadhani, Yogi Yana, *Makalah Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*, (Malang: Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, 2016) h, 2

<sup>62</sup> *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010) h, 8

Muhammadiyah sesuai keputusan Mukhtamar k-46 di Yogyakarta sebanyak 13 majelis, yaitu; Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Kesehatan Umum, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pelayanan Sosial dan Majelis Lingkungan Hidup.<sup>63</sup>

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) adalah “produk baru” sebagai hasil dari putusan Mukhtamar k-45 di Malang tahun 2005.<sup>64</sup>

### **1. Visi Dan Misi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah**

Visi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah adalah “Tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat.”

Misi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah adalah:

1. Menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat.
2. Mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Bedasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>63</sup> m.muhammadiyah.or.id (On-Line) 12 Oktober 2020 pukul 14.17 WIB

<sup>64</sup> Ibid.,

- b. Mengembangkan alternative-alternatif baru program pengembangan masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
- c. Mengintergrasikan kerja Persyarikatan dan Amal Usaha dalam program pengembangan masyarakat.
- d. Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marjinal di perkotaan maupun pedesaan
- e. Meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marjinalisasi sosial perkotaan maupun pedesaan.
- f. Madukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.<sup>65</sup>

## 2. “Medan Jihad” Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah memiliki lima “Medan Jihad” di tengah masyarakat sebagai implementasi spirit Al-Maa’uun. Lima “Medan Jihad” Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah meliputi:<sup>66</sup>

- a. Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangana, meliputi antara lain:
  - 1) Mengembangkan model Pertanian Terpadu (*Integrated Farming*)
  - 2) Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pertanian Terpadu
  - 3) Mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

---

<sup>65</sup> Ibid.,

<sup>66</sup> Bachtiar Dwi Kurniawan, et. al, “*Jihad Keberdayaan, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat “Catatan Perjalanan MPM PP Muhammadiyah Mengentaskan Kemiskinan.*” Yogyakarta: MPM PP Muhammadiyah, 2015, hlm. 4.

- 4) Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Jihad Memberdayakan Sektor Informal, meliputi antara lain:

- 1) Pendampingan Pedagang Asongan
- 2) Pendampingan Abang Becak
- 3) Pendampingan Kaki Lima
- 4) Pendampingan berbagai sektor informal lainnya.

c. Jihad memberdayakan Kaum Buruh, meliputi antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas buruh migran untuk mengembangkan usaha.
- 2) Pendampingan terhadap keluarga buruh migran di tanah air.
- 3) Pendampingan Buruh Gendong.

d. Jihad Advokasi Kebijakan Publik, meliputi antara lain:

- 1) Advokasi Kebijakan Publik yang merugikan rakyat.
- 2) Advokasi Penyusunan APBN maupun APBD

e. Jihad Memberdayakan Kaum Difabel, meliputi antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas kaum difabel
- 2) Fasilitas publik bagi kaum difabel
- 3) Lapangan kerja bagi kaum difabel

## **E. MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH LAMPUNG**

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) adalah “produk baru” sebagai hasil dari putusan Mukhtamar k-45 di

Malang tahun 2005.<sup>67</sup> Sampai saat ini sudah menebarkan derapnya ke beberapa wilayah antara lain; MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (37 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (5 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan (25 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten (11 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan (5 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur (5 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (10 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung (5 Kabupaten/Kota), MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (10 Kabupaten/Kota), dan MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi (10 Kabupaten/Kota)<sup>68</sup>

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung telah bergerak dan menjalankan program pemberdayaannya sejak pertama kali dibentuk. Visi dan misi serta program kerja MPM Daerah pada dasarnya sama dengan visi dan misi serta program yang telah ditentukan secara nasional oleh MPM PP Muhammadiyah.

## **1. Program Strategis Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah (MPM)<sup>69</sup>**

### **a. Sistem Gerakan**

- 1) Terumusnya konsep implementasi Fiqih Al-Maa'uun sebagai basis gerakan kultural Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan dari tingkat daerah sampai ranting.

---

<sup>67</sup> Ibid.,

<sup>68</sup> MPM 1<sup>st</sup> COMMUNITY EMPOWERMENT FORUM, *Rancangan Best Practices And Milestone Program Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020*, UM Malang 10-11 Januari 2020, hlm. 6

<sup>69</sup> Program Kerja Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung tahun 2010-2015

- a) Mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti Teologi/Fiqih Al-Maa'uun dan model pemberdayaan masyarakat lainnya yang terpadu dengan system gerakan Muhammadiyah.
- 2) Ter-revitalisasiya kegiatan dakwah dari daerah sampai tingkat ranting melalui upaya perumusan.
  - b) Konseptualisasai dakwah jamaah untuk pemberdayaan masyarakat
  - c) Sosialisasi dan pengembangan dakwah jamaah untuk pemberdayaan masyarakat
- 3) Terwujudnya rintisan model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan modal social di akar rumput Muhammadiyah
  - d) Perumusan konsep pemberdayaan masyarakat untuk berbagai kelompok masyarakat
  - e) Implementasi konsep pemberdayaan masyarakat untuk berbagai kelompok masyarakat.
  - f) Pengembangan gerakan untuk penguatan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan (*lesson-learn*).

#### **b. Jaringan Organisasi**

- 1) Terbangunnya kinerja yang sinergis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga donor lainnya dari dalam dan luar negeri.
  - a) Meningkatkan jaringan hubungan dan kerjasama baik di lingkungan persyarikatan maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian pada pengembangan *civil society* atau masyarakat madani sejalan dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.

- 2) Terjadinya partisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat madani serta gerakan demokrasi dan hak azasi manusia.
  - b) Pemetaan sumber daya dan modal social yang dimiliki seluruh jajaran Muhammadiyah
  - c) Pemetaan sumber daya dan opotensi berbagai institusi yang menjadi mitra Muhammadiyah
  - d) Menyusun agenda aksi dalam rangka demokratisasi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)
- 3) Terjadinya koordinasi dan sinkronisasi aksi pemberdayaan dengan majelis/ortom/amal usaha yang terkait dengan pemberdayaan.
  - e) Meningkatkan konsolidasi dan komunikasi pimpinan majelis
  - f) Membangun kinerja organisasi dan fungsionalisasi jajaran organisasi.
  - g) Membangun model organisasi dan kepemimpinan yang efektif.
  - h) Meningkatkan kerjasama dengan unsur internal Muhammadiyah.

### **c. Pengembangan Sumber Daya**

- 4) Terdisemenasikannya rencana aksi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kaderisasi seperti pelatihan dan mobilsasi relawan, serta pendamping komunitas.
  - a) Pengembangan potensi SDM untuk pemberdayaan masyarakat
  - b) Pengembangan kualitas pengelola majelis.
- 5) Terjadinya inisiasi peran dan fungsi majelis pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator masyarakat dalam prosen transformasi social dan

perwujudan masyarakat madani serta sebagai pusat komunikasi dan informasi masyarakat

- c) Optimalisasi pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk mempercepat proses transformasi social.
- 6) Termobilisasinya dana pemberdayaan yang melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga donor internasional.
- d) Memobilisasi sumber-sumber dana pemberdayaan masyarakat baik internal maupun eksternal.

#### **d. Aksi dan Pelayanan**

- 7) Tergabungnya kesadaran kritis masyarakat tentang hak warga Negara (*citizen charter*), demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
  - a) Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom up* dan partisipatif untuk komunitas buruh tani, nelayan dan kaum marginal di perkotaan maupun di pedesaan serta membangun kesadaran kritis masyarakat.
  - b) Terbangunnya model-model pemberdayaan berbagai kelompok seperti buruh tani, nelayan, pegawai, kaum miskin kota maupun desa, kaum difabel dan sebagainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
- 8) Mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk pemberdayaan masyarakat disertai peningkatan kualitas pengelola, optimalisasi multimedia dan teknologi informasi dan mobilisasi sumber dana dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat.

- 9) Meningkatkan kapasitas perorganisasian dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai daya dukung yang dimiliki persyarikatan.
- 10) Mengembangkan model-model pertanian, peternakan dan perikanan yang trintegrasi dari hulua sampai hilir menuju pemberdayaan kelompok petani, nelayan, dan peternak yang kuat dan mandiri.
  - c) Terjadinya advokasi kebijakan public, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas yang termarginalkan.
- 11) Meningkatkan advokasidan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh dan kelompok dhu'afa/mustadh'afin lainnya untuk memiliki akses, usaha dan kekuatab kemandirian.
- 12) Meningkatkan perhatian, kepedulian dan advokasi kepada kelompok difabel untuk memperoleh hak-hak dasar dan kesejahteraan dalam kehidupannya.
- 13) Mengupayakan advokasi kebijakan public yang tidak sensitif dan tidak memihak kepada kaum miskin, dhu'afa dan mustadh'afin.
  - d) Ter-rintisnya aktivitas penguatan kapasitas keahlian, modal produksi, yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- 14) Meningkatkan kapasitas keahlian, modal, produksi dan distribusi usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha-usaha lainnya yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

- e) Terbangunnya model *ekonomc recovery centre* masyarakat yang melibatkan seluruh potensi jaringan persyarikatan sebagai basis antisipasi perluasan dampak krisis, basis kegiatan mitigasi krisis yang responsif dan tanggap darurat.

15) Mengembangkan model penanganan *recovery* ekonomi di daerah dan cabang sebagai wahana penanggulangan krisis yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin, dhu'afa dan mustadh'afin.

## **2. Program dan Kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung dibagi menjadi 4 bidang, yaitu:

### **a. Bidang Penataan dan Peningkatan Organisasi**

- 1) Sosialisasi konsep implementasi Fiqih Al-Maa'uun untuk semua jenjang persyarikatan
- 2) Rekonseptualisasi dakwah jamaah untuk pemberdayaan masyarakat
- 3) Sosialisasi dna pengembangan dakwah jamaah untuk pemberdayaan masyarakat
- 4) Peningkatan konsolidasi dan komunikasi pimpinan majelis
- 5) Membangun kinerja organisasi dan fungsionalisasi jajaran organisasi
- 6) Membangun model organisasi dan kepemimpinan yang efektif
- 7) Pengembangan SDM pemberdayaan

- 8) Pengembangan kualitas pengelola majelis (*capacity building*)
  - 9) Optimalisasi pemanfaatan multimedia
- b. Bidang Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Strategis
- 1) Membangun koalisi unsur-unsur masyarakat madani
  - 2) Menjalin kerjasama pemerintah maupun lembaga swasta baik dalam maupun luar negeri.
  - 3) Pemetaan sumber daya dan modal social yang dimiliki seluruh jajaran Muhammadiyah
  - 4) Pemetaan sumber dan potensi berbagai institusi yang menjadi mitra Muhammadiyah
- c. Bidang Advokasi
- 1) Membangun kesadaran kritis masyarakat tentang hak warga Negara, demokrasi dan HAM
  - 2) Advokasi kebijakan publik
- d. Bidang Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Pengembangan model-model pemberdayaan
  - 2) Pengembangan potensi SDM
  - 3) Pengembangan model-model pendampingan kelompok
  - 4) Pengembangan pusat penanganan pasca bencana

Dalam pelaksanaannya, masing-masing program kerja dikerjakan dengan rincian kegiatan, indikator keberhasilan dan tenggat waktu yang sudah direncanakan. Contoh dari pelaksanaan program kerja adalah terlaksananya workshop, pelatihan, upgrading, rakor, sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, hingga pendampingan sampai selesainya program pemberdayaan masyarakat.

### **3. Realisasi Program Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung**

Dalam kurun waktu 2010-2020 Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Lampung telah menjalankan beberapa programnya, seperti melakukan sosialisasi program tingkat Nasional/Regional, juga tingkat daerah, cabang dan ranting. Kerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung melalui gerakan 1000 pohon Cemara Laut, bekerja sama dengan pemerintah memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada para petani, peternak, pekebun, pembudidaya ikan dan petani hutan.<sup>70</sup>

Ada tiga poin utama yang bisa disimpulkan dalam realisasi program MPM Muhammadiyah Lampung:

- a. **Konsolidasi Orgaisasi** yaitu mengembangkan organisasi pada tingkat cabang dan ranting pada tingkat pedesaan.
- b. **Pengembangan Jejaring dan Kerjasama Strategis** yaitu bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Metro dan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat;** yaitu memberikan paket teknologi melalui unit percontohan sektor peternakan, sektor perikanan dan sektor kehutanan.

---

<sup>70</sup> *Laporan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, 2013.

- 1) 7 unit percontohan ternak ikan Gurami kepada kelompok tani di tingkat ranting di 7 desa tersebar 7 PPMse Provinsi Lampung senilai 42,4 juta rupiah.
- 2) 10 unit paket percontohan ternak kambing kepada kelompok tani ditingkat ranting di 10 desa tersebar di 8 kabupaten kota se provinsi Lampung senilai 100 juta rupiah.
- 3) 5 paket percontohan sektor kehutanan meliputi berbagai kayu sengon, jamur, karet GT-1 dan budidaya lebah tersebar pada kelompok tani di tingkat ranting senilai 25 juta rupiah.<sup>71</sup>

Dari upaya realisasi program pemberdayaan masyarakat ini, ada dua aktivitas yang dapat dilakukan secara kontinyu (yang masih berjalan hingga saat ini) dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) Pengembangan Usaha Tani Padi Organik yang berada di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
- 2) Sentra Pengembangan dan Penggemukan Kambing serta Penangkaran Burung Berkicau di Desa Purworejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.<sup>72</sup>

## F. TEOLOGI AL-MA'UN MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki pandangan-pandangan khas dalam berbagai hal. Termasuk dalam semangat berkhidmad untuk masyarakat, Muhammadiyah memiliki kekuatan argument yang kuat. Dasar teori gerakan mereka berasal dari pemaknaan firman Allah yang tertera dalam surat Al-Ma'un. Mereka sering menyebutnya

---

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> *Laporan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, 2018

sebagai Teologi Al-Ma'un.

Surat al-Maun merupakan surat ke 17 yang terdiri atas 7 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiah. Surat al-Maun diturunkan sesudah surat al-Taakatsur yakni surat ke 16 dan sebelum surat al-Kafirun yakni surat ke 18. Nama al-Maun diambil dari kata al Maun yang terdapat pada akhir ayat.

Secara etimologi, al-Maun berarti banyak harta, berguna dan bermanfaat, kebaikan dan ketaatan, dan zakat. Kata "al-Ma'un" berdasarkan tafsir klasik dapat dipahami sebagai hal-hal kecil yang diperlukan orang dalam penggunaan sehari-hari, perbuatan kebaikan berupa pemberian bantuan kepada sesama manusia dalam hal-hal kecil. Dalam maknanya yang lebih luas, kata al-Maun berarti "bantuan" atau "pertolongan" dalam setiap, kesulitan.

Surat ini berdasarkan Asbabun Nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mudzir berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan shalat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan shalat dengan riya' dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim.

Adapun komponen pokok terpenting yang menjadi inspirasi Pergerakan Muhammadiyah dari Surat al-Maun yaitu:

1. Perintah berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Terutama kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas (mustadh'afin).
2. Jangan lupa atau lalai mendirikan shalat.
3. Jangan riya' (pamer) dalam beribadah.
4. Jangan kikir (pelit) untuk beramal dan berbagi dengan sesama.

Keempat hal pokok ini merupakan sifat orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik. Dimana mereka cenderung bermegah-megahan dan berfoya-foya dengan harta benda, lupa dengan ibadah karena sibuk mencari harta semata,

suka memamerkan kebaikan kepada orang lain atau tidak ikhlas dalam beribadah, dan tidak mau berbagi dengan fakir miskin. Itulah kenapa kaum muslimin diperintahkan menjauhi keempat perbuatan tidak baik tersebut. Pelanggaran terhadap keempat larangan tersebut disebut sebagai pendusta agama dan menutup hati kita atas kebenaran dan ketundukan semata karena Allah padahal sebelumnya telah menyatakan iman dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah.

Dalam konteks Muhammadiyah, surat al-Maun memiliki arti yang sangat penting sebab menjadi landasan dasar dan spirit bagi lahirnya gerakan dakwah Muhammadiyah dengan berbagai amal sosialnya berupa rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya. Teologi al-Ma'un –dalam payung Teologi Islam- yang digagas dan dikembangkan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dipandang oleh warga Muhammadiyah berhasil membawa warga gerakan modern ini gigih dan bersemangat untuk membebaskan mustad'afin dari ketertindasannya.

Wujud konkret dari gerakan mereka adalah pendirian beberapa panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, pada dataran konsep, teologi Mustad'afin sesungguhnya merupakan istilah baru, bukan konsep baru, yang dikembangkan dari sumbernya, yakni teologi al-Ma'un sebagai identitas yang diambil dari spirit Q.S. al-Ma'un. Teologi al-Ma'un memberikan kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya bila ternyata kita tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir-miskin dan anak yatim.

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan

bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "*Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*".<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Andri Gunawan, *Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah\* (Theology of Surat al-Maun and Social Praxis in the Life of Muhammadiyah Citizens)*, Jakarta: SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018), hlm. 176

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdurrahman, Hafidz. et.al, *Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Alfatih Press, 2017

Al-Maliki, Abdurrahman *Politik Ekonomi Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2009.

Amin Kudhori, Mohammad. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Universitas Walisongo, 2013

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kabupaten Pesawaran 2020*, BPS Kabupaten Pesawaran, 2020.

Badan Pusat Statistik.. *Kecamatan Tegineneg Dalam Angka 2020*,  
BPS Kabupaten Pesawaran, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Destriana, Ana. *Statistik Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020*,  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020.

Dwi Kurniawan, Bachtiar. et. al, "*Jihad Keberdayaan, Model-Model  
Pemberdayaan Masyarakat "Catatan Perjalanan MPM PP  
Muhammadiyah Mengentaskan Kemiskinan."* Yogyakarta:  
MPM PP Muhammadiyah, 2015,

Febrina Harahap, Erni. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang  
Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh  
dan Mandiri*, Padang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan  
Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, 2012

Gusti Rai Utama, I dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian  
Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta : CV Andi Offset,  
edisi 1

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan  
Fakultas Sikologi UGM, , 2012.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga,  
2012.

Iqbal Hasan, M. *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*, PT.  
Bumi Aksara, Bandung, 2006.

Iqbal Hasan, M. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Juiansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta Kencana , 2013.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.

Khairul Anwar, M., Jovi Septian Ramadhani, dan Yogi Yana, *Makalah Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*, Malang: Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Komunitas Petani Padi Organik Berkemajuan. *Profil Komunitas Petani Organik Berkemajuan*, Teginenang-Pesawaran, Lampung

Lusida, Nesy. *Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, 2017.

M.C, Roeslan. Wawancara dengan penulis, 22 Desember 2020

M.C, Roeslan. Wawancara dengan penulis, 21 November 2020

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Subianto. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2015

Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010.

Muhammadiyah. *Laporan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, 2013.

Muhammadiyah. *Laporan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, 2018

Muhammadiyah. MPM 1<sup>st</sup> COMMUNITY EMPOWERMENT FORUM, *Rancangan Best Practices And Milestone Program Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020*, UM Malang 10-11 Januari 2020,

Muhammadiyah. *Program Kerja Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung tahun 2010-2015*

Murdani, Sus Widayani, Hadromi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.

Nurlita Handayani, Luthfi. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018 (On-Line) tersedia di: pkebs.feb.ugm.ac.id)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsindo, 2000.

Suyatna, Hempri. *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Politik Inklusi Muhammadiyah*, Yogyakarta: UMY Press, 2019.

Theresia, Aprilia. et. al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alabeta, 2014.

**Jurnal:**

Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamshah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslaha*, Kerinci: STAIN Kerinci, Al-Qishthu Voume 13, Nomor 1 2015.

Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Riau: UIN SUSKA RIAU, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, UNSYIAH Kuala: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.

Suguharto, Eko. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Bandan Pusat Statistik*, Samarinda: Jurnal FPIK UNMUL Samarinda, 2007, EPP.Vol.4.N0.2.2007:32-36

Sulistiawati, dan Ahmad Fuad. *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Indragiri: Jurnal Syariah Vol. V, No. 2, Oktober 2017.

**Situs:**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut BKKBN”, (On-Line), tersedia di: [aplikasi.bkkbn.go.id](https://aplikasi.bkkbn.go.id), (24 Oktober 2020)

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen”. (On-Line), tersedia di: [bps.go.id](https://bps.go.id) (8 Maret 2020)

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan Provinsi Lampung”. (On-Line), tersedia di: <https://lampung.bps.go.id> (8 Maret 2019)

Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996

Muhammadiyah. “Ciri Perjuangan Muhammadiyah”. (On-Line), tersedia di: <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-176-det-ciri-perjuangan.html> (12 Maret 2019)

Muhammadiyah. “Majelis-majelis Muhammadiyah”. (Online), tersedia di: <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-46-cam-majelis.html> (3 Agustus 2020)

Muhammadiyah. “Visi Majelis Pemberdayaan Masyarakat”. (On-Line), tersedia di: <http://mpm.muhammadiyah.or.id/> (9 Desember 2019)

*Rencana Program Investasi Jangka Manenengah (RPIJM) Bidang PLPP/PRKP Kabupaten Pesawaran, BAB II, hlm. 1, (On-Line)*

[sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2j](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2j)  
m

